



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUNIARTO AGUS WINOKO
2. Jabatan : KPS D4 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF PSDKU LUMAJANG
3. NHK : 962008

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.450.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/144 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/144 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/107 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 556.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOBIL, ISUZU TBR54 PRLC STD Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 860.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.868.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.868.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.